

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI DAMPAK  
NEGATIF PENGGUNAAN OBAT PENAMBAH STAMINA PRIA  
(APHRODISIAC) ILEGAL YANG DIPERDAGANGKAN SECARA BEBAS  
(STUDI DI KOTA SURABAYA)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**TOMI RIZKI**

**NIM. 0710110007**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Dampak Negatif  
Penggunaan Obat Penambah Stamina Pria (Aphrodisiac) Ilegal Yang  
Diperdagangkan Secara Bebas**

**(Studi di Kota Surabaya) Sentot P.S, S.H. M.H.,  
Indrati, S.H., M.S.**

Oleh: TOMI RIZK<sup>1</sup>

**ABSTRAKSI**

Artikel ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dari dampak negative penggunaan obat penambah stamina pria (aphrodisiac) ilegal yang diperdagangkan secara bebas. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan obat (aphrodisiac) yang diperdagangkan secara bebas di kota Surabaya, upaya dan hambatan yang dihadapi oleh BPOM untuk mencegah dan/ atau menanggulangi peredaran bebas obat-obatan terlarang tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan obat penambah stamina pria (aphrodisiac) yang diperdagangkan secara bebas di kota Surabaya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan obat penambah stamina pria ilegal beredar di Surabaya, faktor pedagang, dari pedagang kios, toko dan pedagang online, faktor aparat penegak hukum yaitu pejabat Bea dan Cukai, kepolisian. Upaya BPOM menanggulangi peredaran bebas obat penambah stamina pria ilegal, upaya sosialisasi melalui media elektronik, sosialisasi secara konvensional yaitu kerja sama antara BPOM Surabaya dengan masyarakat, BPOM dengan Dinas Kesehatan Surabaya, kerjasama dengan Bea dan Cukai, Hambatan BPOM dalam menanggulangi peredaran bebas obat penambah stamina pria ilegal, hambatan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

internal terbatasnya dana BPOM dalam melakukan razia, hambatan eksternal yaitu dengan pelaku usaha, dengan institusi lainya, seperti dengan polisi, dan pengadilan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Dampak Negatif Penggunaan Obat Penambah Stamina Pria (Aphrodisiac) Ilegal Yang Diperdagangkan Secara Bebas**

## ABSTRACTION

This scientific article discusses neighbor legal protection to consumers from the negative effects of drug use male stamina enhancer (aphrodisiac) illegally traded freely. How elevated is the problem in the legal protection of the rights of consumers who are harmed by the use of drugs (aphrodisiac) are traded freely in the city of Surabaya, the effort and the obstacles faced by any national authorities to prevent and /or menanggulangi free circulation of these drugs. This research uses empirical research to the sociological juridical approach. From the results of the analyst who conducted it can be seen that the legal protection of the rights of consumers who are harmed by the use of male stamina enhancer drugs (aphrodisiac) freely traded in Surabaya, there are factors that cause male stamina enhancer illegal drug circulating in Surabaya, the factor merchant, from merchant stalls, stores and online merchants, factors that law enforcement officers of Customs and Excise, the police. Efforts to tackle BPOM free circulation of men's stamina enhancing drugs illegal, dissemination efforts through the electronic media, the conventional socialization of cooperation between the community BPOM Surabaya, Surabaya Kesehatan BPOM with the Department, in cooperation with Customs and Excise, Barriers BPOM in free circulation menggulangi stamina enhancing drugs male illegal, internal barriers to budget limitations BPOM in a raid, the external barriers to businesses, with other institutions, such as the police, and the courts.

**Keywords: Consumer Legal Protection Against Negative Impact Of Drug Use Male Stamina Enhancer (Aphrodisiac) That Illegal Freely Traded**

## A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi hanya pelaku usaha yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang mempunyai daya saing tinggi dan memenangkan persaingan baik di dalam maupun luar negeri. Di sisi lain perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Lebih-lebih keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada dipihak lemah dalam menghadapi pihak produsen.

Oleh karena timbulnya banyak permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan suatu produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut “UUPK”. Untuk melindungi hak-hak konsumen, hak atas keyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen Dengan adanya undang-undang tersebut maka diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat.

Bebasnya peredaran obat-obat penambah stamina pria yang ternyata banyak diminati konsumen, pada sisi lain sebenarnya ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan yang dimaksud adalah melalui proses perizinan yang berfungsi preventif agar tidak merugikan konsumen. Di Indonesia sendiri tidak kurang dari 1.800 jenis obat ilegal telah beredar dengan omzet perdagangan obat tersebut ditaksir hingga mencapai 30 triliun rupiah.<sup>2</sup> Dalam obat-obatan ilegal yang beredar tersebut terdapat sebuah peredaran obat penambah setamina pria atau obat kuat yang dalam bahasa ilmiahnya aphrodisiac. Pengertian *aphrodisiac* adalah Menurut Wikipedia, *the free encyclopedia*, *aphrodisiac* adalah benda yang dapat berupa obat-obatan, makanan, minuman, wewangian, atau

---

<sup>2</sup> Cyber health, 2010, **Peredaran Obat Palsu Makin Marak**, (online), <http://cybermed.cbn.net.id>, (3 Agustus 2012)

peralatan yang diklaim dapat meningkatkan dorongan seksual (*sexual desire*) sehingga menambah kenikmatan bercinta.<sup>3</sup>

Dalam rangka menuju era globalisasi dan pasar bebas, pembinaan dan pengawasan terhadap perdagangan obat penambah stamina pria sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah demi melindungi masyarakat sebagai konsumen yang banyak menggunakan obat penambah stamina pria. Hal ini mempunyai konsekuensi dan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen atas kemungkinan peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu kesehatan dan keamanan.

Pengawasan tidak hanya terhadap konsumen, produsen dan pemerintah, tetapi juga terhadap sistem peredaran di pasaran, sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan jika ada pengaduan dari masyarakat. Dalam hal penindakan, Pemerintah harus tegas menerapkan sanksi dalam menyikapi kasus obat penambah stamina pria ilegal karena bila penerapan sanksinya belum tegas maka kemungkinan besar peredaran obat tersebut semakin meningkat

Oleh karena itu, BPOM telah melakukan penertiban obat penambah stamina pria dengan cara menarik produk-produk dari peredaran. BPOM menarik 22 merek obat penambah stamina pria yang beredar dipasaran. Selain itu BPOM juga melakukan peringatan kepada penjual agar tidak menjual obat penambah stamina pria ilegal yang sudah ditarik dari peredaran. Kendala dari tindakan tersebut adalah jika sanksi yang dikenakan terlalu ringan sehingga kejadian akan terulang kembali.<sup>4</sup>

Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian di Kota Surabaya dan di Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya, dimana hasil penelitian tersebut dituangkan kedalam artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Dari Dampak Negatif Penggunaan

---

<sup>3</sup> Mulyadi Tedjapratna, 2010, **Mitos Sekitar Obat kuat** (online), <http://www.dechacare.com> , (4 Agustus 2012)

<sup>4</sup> Okezone news, 2010, **BPOM Tarik 22 Obat Kuat dari Peredaran** (online), <http://news.okezone.com>, (15 Agustus 2012)

Obat Penambah Stamina Pria (Aphrodisiac) Ilegal Yang Diperdagangkan Secara Bebas (Studi Di Kota Surabaya), untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan obat penambah stamina pria (aphrodisiac) yang diperdagangkan secara bebas di kota Surabaya dan menganalisis upaya preventif dan represif yang dilakukan BPOM Surabaya menghentikan peredaran bebas obat-obatan terlarang tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan obat penambah stamina pria (aphrodisiac) yang diperdagangkan secara bebas di kota Surabaya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah dan/ atau menanggulangi peredaran bebas obat-obatan terlarang tersebut?

## **C. METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun dari penelitan yang dilakukan penulis, dimana jenis penelitian ini adalah penelitian hukum adalah yuridis empiris yang bertujuan mendapatkan hasil penelitian yang obyektif. Untuk mendapatkan hasil obyektif sesuai dengan masalah yang diajukan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi yaitu dengan cara mengkaji pelaksanaan peraturan dan undang-undang di masyarakat .

Pendekatan bersifat yuridis dimaksudkan agar permasalahan ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Sedangkan pendekatan bersifat sosiologis dimaksudkan untuk memberikan jawaban akan masalah- masalah yang terkait dengan masalah yang akan dibahas yaitu dengan cara penelitian lapangan, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Dampak Negatif Penggunaan Obat Penambah Stamina Pria ( *Afrodisiak* ) Ilegal Yang Diperdagangkan Secara Bebas (Studi Di Kota Surabaya).”. Peneliti ingin meneliti perlindungan hukum atas hak-hak konsumen

yang dirugikan akibat penggunaan obat penambah stamina pria (aphrodisiac) yang diperdagangkan secara bebas di kota Surabaya. Serta hendak meneliti menganalisis upaya preventif dan represif yang dilakukan BPOM Surabaya menghentikan peredaran bebas obat-obatan terlarang tersebut.

Di dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yaitu :

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari dampak negatif penggunaan obat Penambah Stamina Pria (aphrodisiac) ilegal yang diperdagangkan secara bebas di Surabaya. Serta pengamatan dan wawancara dengan pedagang penjual obat penambah stamina pria di Surabaya.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen secara teknis yaitu dari sumber bacaan, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>5</sup>

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Tentang Kota Surabaya**

Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki luas sekitar 326,37 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak di antara 07° 21' Lintang Selatan dan 112° s/d 112° 54' Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan air laut. Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebelah Utara dan Timur dibatasi oleh selat

---

<sup>5</sup> Abdulkadir, Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 172.



Madura, sebelah selatan dibatasi oleh kabupaten Sidoarjo dan sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik.<sup>6</sup>

## **2. Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan obat penambah stamina pria (*aphrodisiac*) yang diperdagangkan secara bebas di kota Surabaya.**

### **1) Pedagang**

Beredarnya obat penambah stamina pria di Surabaya tak lepas dari pedagang penjual obat penambah stamina pria ilegal itu sendiri, para pedagang ini memudahkan konsumen untuk mendapatkan obat penambah stamina pria tersebut, pedagang penjual obat tersebut terdiri dari 3 jenis, yaitu pedagang kios, pedagang toko pedagang online, dan melakukan beberapa pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pedagang tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat penambah stamina pria. Pedagang tersebut melanggar ketentuan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu “Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.<sup>7</sup>
- b. Pedagang obat penambah stamina pria ilegal ini memperjual belikan obat, yang tidak memiliki keterangan berbahasa Indonesia, keterangan kadaluarsa, pedagang tersebut telah melanggar Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Pasal 3, “Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman”.<sup>8</sup>
- c. Pedagang penjual obat penambah stamina pria ilegal ini dalam menyimpan dan memperlakukan obat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tata cara penyimpanan obat, Seperti membiarkan obat terkena paparan sinar matahari

---

<sup>6</sup> Surabaya.go, 2012, **Profil kota Surabaya** (online), <http://www.surabaya.go.id>, (10 Januari 2013)

<sup>7</sup> Indonesia Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat 1.

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Pasal 3

langsung, tempat penyimpanan obat menggunakan wadah yang tidak layak dan suhu ruangan penyimpanan obat tidak sesuai standart yang ditentukan dalam Keputusan Menkes Nomor 1027 yaitu “Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan”.<sup>9</sup>

#### d. Pedagang Online

Pedagang online, pedagang yang memperjual belikan obat penambah stamina pria ilegal yang menggunakan Transaksi elektronik, pedagang ini menggunakan media internet untuk menawarkan obat penambah stamina pria ilegal melalui social media seperti Facebook.com, toko bagus.com, kaskus.com, dan media social internet lainnya, pedagang ini melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 47 ayat (2) Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>10</sup>

## 2) Aparat Penegak Hukum

### a. Bea dan Cukai

Terdapat oknum aparat bea dan cukai yang meloloskan barang impor ilegal, seperti Agus Sjafiin Pane seorang Pejabat Fungsional pemeriksaan Dokumen (PFPD) Bea Cukai, yang terbukti menerima uang suap, uang tersebut berasal dari sejumlah importir, terkait penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang impor ilegal, sepanjang Januari-Mei 2010, dan pejabat Bea dan Cukai tersebut membagi-bagikan kepada 20 orang pejabat fungsional pemeriksa dokumen Bea Cukai.<sup>11</sup>

Perbuatan tersebut jelas melanggar Keputusan Dirjen Bea Cukai bernomor Kep-04/Bj/2002 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai

---

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/menkes/SK/IX?2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Bab II

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 47 ayat (2) Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>11</sup> Hukum online, 2010, **Pegawai bea cukai dituntut hukuman 3,5 tahun penjara** (online), <http://www.hukumonline.com/berita>, (05 Februari 2013)

Direktorat jendral Bea dan Cukai, Direktur Jendral Bea dan Cukai.  
Pegawai Bea cukai harus mentaati kode etik yaitu:<sup>12</sup>

b. Kepolisian

Pelabuhan-pelabuhan kecil di perairan Indonesia merupakan gerbang masuknya barang-barang impor ilegal, khususnya Obat penambah Stamina pria ilegal melalui pelabuhan kecil atau yang dikenal dengan sebutan pelabuhan tikus, dari pelabuhan kecil obat penambah stamina pria tersebut di kumpulkan di kota-kota besar di Indonesia dan di pasarkan di masyarakat, lemahnya pengawasan Kepolisian terhadap pelabuhan-pelabuhan kecil ini terutama polisi air dan aparat kepolisian dalam memberantas peredaran obat ini, yang menyebabkan obat penambah stamina pria ilegal ini beredar di masyarakat.

**a. Upaya yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah dan/atau menanggulangi peredaran bebas obat-obatan terlarang tersebut.**

**a. Upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan**

Upaya BPOM terkait perlindungan konsumen terhadap obat penambah stamina pria berbahan berbahaya sangat perlu. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan tumbuhnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat agar hak-haknya sebagai konsumen terjamin dengan baik. Adapun sosialisasi informasi terkait peredaran obat penambah stamina berbahan berbahaya yang telah dilakukan BPOM adalah:

a) Sosialisasi Melalui Media Elektronik

Dalam upaya menanggulangi maraknya peredaran obat penambah stamina pria Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan tindakan identifikasi dan menemukan 83 (delapan puluh tiga) situs website yang memasarkan obat ilegal dan atau palsu. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan

---

<sup>12</sup> Keputusan Dirjen Bea Cukai bernomor kep-04/BJ/2002 Tentang Kode Etik Pegawai.

dan disita 66 item obat ilegal yang terdiri dari 40 item produk kategori disfungsi ereksi, 3 item perangsang wanita/*female libido drugs*, 4 item anestesi lokal, 8 item obat tradisional penurun berat badan dan item suplemen makanan ilegal, serta 9 item produk kategori lainnya dengan nilai keekonomian ditaksir sekitar Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah).

b) Sosialisasi Secara Konvensional

Sosialisasi secara konvensional yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan melibatkan kerjasama dengan Masyarakat dan institusi lainnya, meliputi:

1) Kerjasama antara Badan Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya dengan Masyarakat

Upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya dalam menegakan perlindungan konsumen telah dilakukan dengan cara mengundang para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpengaruh di Surabaya. Dengan ruang lingkup beberapa Kecamatan di Surabaya. Adapun dari tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, PKK, Dharma wanita, Ketua Lurah, RW dan RT, dan lain-lain.

2) Kerjasama Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dengan Dinas Kesehatan Surabaya.

Selain penyuluhan yang diberikan kepada tokoh agama dan masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya juga melakukan upaya perlindungan konsumen terkait peredaran obat penambah stamina pria ilegal. Berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan penyebaran informasi dalam bentuk *hard copy* (print di kertas) yang disebarakan melalui 58 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) se-Kota Surabaya.

Alur Penyebaran Informasi:

Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya→Dinas Kesehatan Kota Surabaya→Puskesmas→Kader-kader Posyandu→Masyarakat

### 3) Kerjasama Dengan Bea dan Cukai

Untuk meningkatkan kinerja Badan Obat dan Makanan Surabaya untuk menanggulangi peredaran obat penambah stamina pria ilegal, BPOM bekerja sama dengan Bea Cukai. Dengan Adanya Surat Keputusan Bersama Nomor HK.00.04.22.1989 Dan KEP-49/BC/2006 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Makanan.

Direktur Jendral Bea dan Cukai mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Melakukan pengawasan terhadap impor dan ekspor obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen/suplemen makanan, narkotika, psikotropika, prekursor, PKRT dan makanan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;
- b. Menyampaikan informasi kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal terdapat impor dan ekspor obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen/suplemen makanan, narkotika, psikotropika, prekursor, PKRT dan makanan yang tidak memiliki Ijin Edar dan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pengawasan obat dan makanan.

### **b. Hambatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan**

Terkait penegakan hukum di dalam upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran obat penambah stamina pria ilegal, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya. Adanya hambatan tersebut menyebabkan upaya perlindungan konsumen oleh Badan Pengawasan

---

<sup>13</sup> Keputusan Bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor HK.00.04.22.1989 Dan KEP-49/BC/2006 Tahun 2006

Obat dan Makanan Surabaya kurang efektif. Kekurangan ini disebabkan berbagai hambatan baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

**a. Hambatan Internal**

Hambatan internal yang dialami Badan Pengawasan Obat dan Makanan kota Surabaya, yaitu:

1) Terbatasnya Dana

Terbatasnya dana yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surabaya. Menjadi salah satu hambatan efektifitasnya kinerja BPOM Kota Surabaya dalam upaya perlindungan konsumen terhadap obat penambah stamina pria ilegal yang beredar di masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya . Surabaya dibagi atas 5 wilayah yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan. Dan terdapat 31 kecamatan.

**b. Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal yang dialami Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya, Yaitu:

1) Dengan Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang tidak peduli dan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku terutama terkait dengan perlindungan konsumen hal ini tentu menjadi penghambat Badan pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran obat penambah stamina pria ilegal di masyarakat. Sebagai contoh, Pada bulan Juni 2012 Badan Pengawas Obat dan Makanan kota Surabaya telah melakukan razia di tujuh toko obat kuat.

Dimana para pemilik toko atau kios tersebut tidak mengantongi surat ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya. Namun, sebulan kemudian (bulan juli 2012) di jalan Arjuna kios-kios para penjual tersebut

masih memperjual belikan obat penambah stamina pria dengan jenis dan merek yang sebelumnya dilarang dijual belikan.

## 2) Dengan Institusi Lainnya

### a) Polisi

Tumpang tindih kewenangan antara (PPNS) Penyidik Pengawai Negeri Sipil BPOM dengan Penyidik Kepolisian. Wendy Mallyan Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM mengatakan ketidak pahaman penyidik Polri terhadap kasus pelanggaran obat dan makanan, dimana penyidik Polri jarang menggunakan UU kesehatan dan penyidik polri cenderung menggunakan peraturan yang lebih lama sehingga tidak sedikit laporan BPOM yang tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian dengan alasan tidak ditemukan adanya pelanggaran.<sup>14</sup>

### b) Pengadilan

Hal ini juga terjadi dalam sebuah Pengadilan, perbedaan persepsi Hakim dalam menangani perkara hasil penyidikan BPOM. Putusan majelis hakim sebagian besar tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pada obat dan makanan. Dengan banyaknya terdakwa yang hanya dikenakan hukuman percobaan. Hal ini terjadi di Pengadilan Denpasar Bali, Corry Panjaitan Kepala Badan Peangawasan Obat dan Makanan Bali kecewa dengan putusan pengadilan Denpasar yang hanya memberikan hukuman percobaan satu bulan terhadap pelaku penjual obat ilegal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hukum online, 2010, **Kewenangan PPNS tumpang tindih dengan Polri** (online), <http://www.hukumonline.com/berita>, (06 Februari 2013)

<sup>15</sup> Hukum online, 2012, **BPOM sesalkan hukuman ringan bagi produsen** (online), <http://www.hukumonline.com/berita>, (06 Februari 2013)

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan obat penambah stamina pria (*aphrodisiac*) yang di perdagangkan secara bebas di kota Surabaya. Beredarnya obat penambah stamina pria ilegal di masyarakat tak lepas dari berbagai faktor yang mengakibatkan obat tersebut di jual belikan secara bebas di Surabaya, sehingga konsumen tidak sulit untuk mendapatkannya, faktor-faktor yang menyebabkan obat penambah stamina pria ilegal beredar di Surabaya, baik dari segi pedagang dan aparat penegak hukumnya, sebagai berikut:

#### **a. Pedagang.**

Pedagang obat penambah stamina pria ilegal, telah banyak melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan undang-undang yaitu:

- 1) Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 106 Ayat 1.
- 2) Peraturan BPOM Nomor HK. 03.1.23.10.11.0841 Tahun 2001 Pasal 3. Tentang Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.

#### **b. Aparat**



Beredarnya obat penambah stamina pria di masyarakat Surabaya tak lepas lemahnya aparat hukum yang terkait sebagai berikut:

1) Pejabat Bea Cukai

Adanya pelanggaran yang dilakukan aparat Bea dan Cukai mengenai Kode Etik dan Perilaku Pegawai yang diatur oleh Keputusan Dirjen Bea Cukai bernomor Kep-04/Bj/2002 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Direktorat jendral Bea dan Cukai. Yang mengakibatkan lolosnya barang ilegal di pelabuhan khususnya obat penambah stamina pria ilegal.

2) Kepolisian

Masuknya obat penambah stamina pria ilegal, melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia, diakibatkan lemahnya pengawasan Kepolisian terutama polisi air, yang menyebabkan obat penambah stamina pria ilegal ini beredar di masyarakat.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi menjadi institusi Pengawas obat dan makanan yang melindungi masyarakat, khususnya melindungi dari beredarnya obat penambah stamina pria ilegal di Surabaya, dalam hal ini BPOM mempunyai upaya untuk melindungi masyarakat dari beredarnya obat penambah stamina pria ilegal di Surabaya, dan BPOM mempunyai hambatan dalam menanggulangi beredarnya obat penambah stamina pria di Surabaya, upaya dan hambatan tersebut sebagai berikut:

- Upaya BPOM

- a. Sosialisasi melalui media elektronik.
- b. Sosialisasi secara Konvensional.
- c. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Surabaya.
- d. Kerjasama dengan Bea dan Cukai.

- Hambatan BPOM

- a. Hambatan internal

Terbatasnya dana yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surabaya. Menjadi salah satu hambatan efektifitasnya kinerja BPOM Kota Surabaya dalam upaya perlindungan konsumen terhadap obat penambah stamina pria ilegal yang beredar di masyarakat.

- b. Hambatan Eksternal

- 1) Dengan Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang tidak peduli dan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku terutama terkait dengan perlindungan konsumen hal ini tentu menjadi penghambat Badan pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran obat penambah stamina pria ilegal di masyarakat.

- 2) Polisi

Tumpang tindih kewenangan antara (PPNS) Penyidik Pengawai Negeri Sipil BPOM dengan Penyidik Kepolisian. Wendy Mallyan Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM mengatakan ketidak pahaman penyidik Polri terhadap kasus pelanggaran obat dan makanan, dimana penyidik Polri jarang menggunakan UU kesehatan dan penyidik Polri cenderung menggunakan peraturan yang lebih lama sehingga tidak sedikit laporan BPOM yang tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian dengan alasan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

- 3) Pengadilan

Hal ini juga terjadi dalam sebuah Pengadilan, perbedaan persepsi Hakim dalam menangani perkara hasil penyidikan BPOM. Putusan majelis hakim sebagian besar tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pada

obat dan makanan. Dengan banyaknya terdakwa yang hanya dikenakan hukuman percobaan.

## **2. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pemerintah harus saling berkordinasi, dan bekerja sama dalam memberantas peredaran obat penambah stamina pria ilegal dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, khususnya BPOM dengan instansi Direktorat Bea dan Cukai, Polisi dan Pengadilan.
2. Diperlukan kerja sama yang lebih baik antara instansi pemerintah yang terkait khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai instansi yang mengawasi masuknya barang impor ke daerah pabean Indonesia dengan BPOM sebagai instansi yang mengawasi peredaran produk makanan di Indonesia.
3. Pemerintah wajib melakukan fungsi pengawasan secara seksama terhadap peredaran produk obat pada umumnya dan produk obat penambah stamina pria khususnya dan menghindari praktik suap yang kerap terjadi di pelabuhan-pelabuhan pada saat dilakukan pemeriksaan barang impor. Pemerintah juga harus meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan peredaran obat penambah stamina pria yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah harus lebih konsiten dan tegas dalam menerapkan ketentuan hukum tentang obat penambah stamina pria agar penerapan sanksi tidak berbeda-beda dan tidak terlalu ringan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha obat penambah stamina pria ilegal.
5. Konsumen harus memiliki kesadaran yang tinggi akan hak-haknya ketika mengkonsumsi produk obat penambah stamina pria. Sehingga konsumen harus mempelajari dengan baik mengenai hak-hak yang mereka peroleh berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Abdulkadir, Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

### **Situs Internet :**

Cyber health, **Peredaran Obat Palsu Makin Marak** (online), <http://cybermed.cbn.net.id>, (3 Agustus 2012), 2010.

Mulyadi Tedjapratna, **Mitos Sekitar Obat kuat** (online), [http:// www.dechacare .com](http://www.dechacare.com), (4 Agustus 2012), 2010.

Okezone news, **BPOM Tarik 22 Obat Kuat dari Peredara** (online), <http://news.okezone.com>, (15 Agustus 2012), 2010.

Surabaya.go, **Profil kota Surabaya** (online), <http://www.surabaya.go.id>, (10 Januari 2013), 2012.

Hukumonline, **Pegawai bea cukai dituntut hukuman 3,5 tahun penjara** (online), [http://www.hukumonline. com/berita](http://www.hukumonline.com/berita), (05 Februari 2013), 2010.

Hukumonline, **KewenanganPPNS tumpang tindih dengan Polri** (online), [http:// www.hukumonline.com /berita](http://www.hukumonline.com/berita), (06 Februari 2013), 2010.

Hukumonline, **BPOM sesalkan hukuman ringan bagi produsen** (online), [http://www.hukumonline.com /berita](http://www.hukumonline.com/berita), (06 Februari 2013), 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Indonesia.UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

-----UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabean.

-----UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

-----PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

-----Peraturan Menteri Kesehatan 284/menkes/Per/III/2007

- Keputusan Dirjen Bea Cukai No.04/BJ/2002
- Keputusan Menteri Kesehatan No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang  
Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek.
- Keputusan Bersama Kepala BPOM dan Bea Cukai No.49/BC/2006
- Peraturan Kepala BPOM No. HK.02.1.23.10.11.08481 Tahun 2001